

HARAPAN IBN KHALDUN

Oleh Nurcholish Madjid

Ibn Khaldun — seorang filsuf dan sejarawan Muslim besar abad ke-14 — pernah mempunyai harapan besar perlunya dikembangkan apa yang disebutnya *‘ulūm al-‘umrān* (ilmu-ilmu peradaban), yang berinduk kepada ilmu sejarah. Tetapi harapan tersebut seolah sia-sia, dan tidak mendapat sambutan dari para ilmuwan dunia Islam, karena pada masa dan setelah Ibn Khaldun adalah masa kemunduran, yang kemudian banyak tradisi peradaban Islam itu masuk ke Barat, sampai dengan unggulnya peradaban Barat itu, dan kemudian kemenangan mereka atas kaum Muslim. Di Barat itulah kemudian ilmu-ilmu sosial yang dirintis Ibn Khaldun menemukan sambutan yang bersemangat, dan menghasilkan yang sekarang disebut ilmu-ilmu sosial modern.

Dari sudut pertimbangan Islam, pertumbuhan ilmu-ilmu sosial di Barat banyak diwarnai oleh pandangan kehilangan kejujuran ilmiah. Bagaimana subyektivisme orang-orang Barat dalam memandang masalah-masalah sosial-historis orang-orang lain, dapat dilihat bagaimana mereka dahulu memandang Islam dan orang Islam. Dari sekian banyak kekeliruan yang tidak terhitung itu, salah satunya yang paling simbolik ialah penggunaan perkataan “*Muhammedanism*” sebagai nama untuk agama Islam, dan “*Muhammedans*” untuk kaum Muslim. Sebab dalam pandangan mereka yang keliru itu, umat Islam adalah para pemeluk agama yang menyembah seseorang yang bernama Muhammad. Kekeliruan yang amat prinsipil itu bersumber dari pandangan mereka yang “mengukur baju orang dengan badan

sendiri.” Karena mereka menganut agama yang menyembah seorang tokoh yang mereka beri nama Kristus sehingga agama itu dinamakan agama Kekristenan (*Christianity*), sehingga mereka langsung melihat orang lain serupa dengan diri mereka sendiri.

Karena potensi subyektivitas setiap golongan tidak mungkin diabaikan begitu saja, maka timbullah sikap-sikap waspada terhadap ilmu-ilmu sosial yang datang dari peradaban atau kebudayaan lain. Ilmu-ilmu sosial dianggap tidak dapat menyajikan kebenaran yang benar-benar handal, sehandal kebenaran sajian ilmu-ilmu alam. Tapi jika ilmu-ilmu sosial benar-benar hanya bernilai subyektif, maka tentunya tidak patut disebut sebagai ilmu. Karena itu seperti halnya mitos, dongeng ataupun bahkan kisah-kisah karangan seperti novel, misalnya, ilmu-ilmu sosial itu kata mereka, hanya berguna untuk dibaca sebagai pelewat waktu atau pelipur lara. Hal itu dibuktikan oleh besarnya peranan bahasa dan penggunaannya: ilmuwan sosial yang baik adalah yang mengetahui bahasa dengan baik dan dapat menggunakannya dengan baik pula, khususnya dalam menyajikan pikiran-pikiran. Tetapi pandangan ini tidak sepenuhnya benar.

Dalam al-Qur’an misalnya jika kita mencoba mencari dasar teologis, hukum-hukum yang mengatur kehidupan sosial manusia diistilahkan dengan kata-kata “*sunnah*” yang berarti “kebiasaan,” seolah-olah sudah diisyaratkan tentang sifatnya yang kurang pasti, karena hanya kejadian berulang-ulang semata. Ini dapat dibandingkan dengan penggunaan kata-kata “*taqdir*” dalam al-Qur’an untuk hukum-hukum yang mengatur alam kebendaan. Dan kata-kata “*taqdir*” itu dapat diartikan dengan sedikit tafsir sebagai ‘rancangan yang pasti’. Misalnya, perjalanan matahari menurut garis edarnya yang telah ditetapkan disebutkan dalam al-Qur’an sebagai *taqdir* Tuhan Yang Mahamulia dan Mahatahu; dan rembulan yang berubah-ubah dari bulan purnama ke bulan sabit diterangkan sebagai telah di-*taqdir*-kan oleh Tuhan.

“Dan matahari beredar menurut waktu yang sudah ditentukan baginya; itulah ketentuan Yang Mahaperkasa, Mahatahu. Dan bulan

pun, telah Kami tentukan manzil-manzilan (untuk dilintasi), sampai ia kembali seperti bagian bawah tangkai kurma yang sudah tua (kering),” (Q 36:38-39).

Jadi dilihat dari etimologi peristilahan yang digunakan al-Qur'an itu, terkesan bahwa ilmu-ilmu sosial, karena “menggarap” *sunnah* Allah, yaitu “adat-kebiasaan” Allah, seperti diistilahkan dalam tafsiran Ibn Katsir, ditambah lagi dengan potensi manusia untuk berpikir subyektif tentang dirinya, dan masyarakat lingkungannya, maka sulit menghasilkan “kebenaran” yang mengarah kepada kepastian. Sedangkan ilmu-ilmu alam, karena “menggarap” “*taqdīr*” atau “rancangan pasti” Tuhan, lebih mudah menyajikan “kebenaran” yang mengarah kepada kepastian. Karena itulah ilmu-ilmu sosial biasa disebut sebagai “ilmu-ilmu lunak” (*soft sciences*), tidak bersifat “eksakta,” sedangkan ilmu-ilmu kebendaan biasa disebut “ilmu-ilmu keras” (*hard sciences*) atau “ilmu-ilmu eksakta” (*exact sciences*).

Tapi jika kita kembali kepada apa yang disebut dalam al-Qur'an tentang *sunnah* Allah yang ditegaskan sebagai tidak akan didapati perubahan ataupun peralihan apa pun, jadi bersifat pasti dan “eksakta,” sesungguhnya ilmu-ilmu sosial pun harus dan tentunya dapat menuju kepada tingkat yang mampu menyajikan “kebenaran” (ilmiah) yang mengarah kepada kepastian yang lebih besar, sama dengan ilmu-ilmu alam. Namun melihat bahwa kedua jenis hukum Tuhan itu — hukum untuk kehidupan sosial-historis manusia, dan hukum untuk alam kebendaan — digunakan dua istilah yang berbeda, yaitu yang satu *sunnah* dan yang lainnya *taqdīr*, maka berarti memang ada masalah berkenaan dengan tingkat kepastian masing-masing ilmu yang menggarapnya.

Tingkat kepastian yang lebih tinggi ada pada ilmu-ilmu alam terbukti dengan kemungkinannya dan mudahnya melakukan kualifikasi datanya yang relevan. Ilmu-ilmu alam banyak menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga masalah angka menjadi amat penting, hal mana barangkali justru memang tidak mungkin

lain daripada itu. Dan kurangnya kepastian pada ilmu-ilmu sosial dicerminkan dalam sulitnya, atau tidak-mungkinnya melakukan kualifikasi datanya, sekeras dan sepasti ilmu-ilmu alam. Karena itu pendekatan ilmu-ilmu sosial lebih mengarah kepada pendekatan kualitatif, hal mana berarti bahwa teori besar (*grand theory*) dan interpretasi kenyataan-kenyataan empirik menurut kerangka teori besar itu menjadi amat penting. Perbedaan itu disebabkan karena variabel dalam ilmu-ilmu sosial sedemikian banyaknya sehingga amat sulit dikuasai seluruhnya.

Dalam keadaan seperti ini, konklusi apa pun menjadi bersifat tentatif, “boleh jadi,” atau dalam istilah agamanya “*insyā’ Allāh*,” yaitu kalau Tuhan menghendakinya. Maka suatu konklusi ilmu sosial akan selalu mengandung kemungkinan keliru, seperti kelirunya secara fatal para ahli studi Iran di Amerika yang sama sekali tidak mampu meramalkan bakal terjadinya revolusi para *Mullah* di bawah pimpinan Imam Khomeini (sehingga banyak buku-buku tentang Iran yang langsung batal). Salah satu sebabnya ialah, karena para ilmuwan sosial ahli masalah Iran itu tidak mampu, bahkan mengabaikan, variabel suasana batin keagamaan orang-orang Iran yang memang tidak mungkin diobservasi dari luar secara langsung dan pasti. Namun fakta ini tidaklah berarti bahwa ilmu-ilmu sosial harus ditinggalkan begitu saja.

Jika al-Qur’an menyebutkan adanya *sunnah* Allah pada kehidupan sosial-historis manusia dengan peringatan agar manusia menyadarinya, dan mempelajarinya dengan memperhatikan sejarah (pengalaman hidup umat-umat masa lalu), maka ilmu-ilmu sosial dengan segala kekurangannya dapat dipandang sebagai pelaksanaan perintah suci itu. Sebab ilmu-ilmu sosial tidak lain adalah wujud usaha manusia untuk memahami hukum-hukum kehidupan kolektifnya, suatu kehidupan yang mewujud nyata dalam pengalaman sosial-historis manusia.

Jelas sekali bahwa sikap kritis terhadap ilmu-ilmu sosial harus diterapkan secara lebih cermat daripada terhadap ilmu-ilmu alam. Tapi sikap kritis itu tidak berarti menafikan sama sekali kemung-

kinan adanya unsur kebenaran dalam ilmu-ilmu sosial. Justru demi kemajuannya sendiri sebagai ilmu yang menggarap bidang yang lebih rumit daripada gejala kebendaan, yaitu gejala kehidupan manusia sebagai makhluk yang berkesadaran, ilmu-ilmu sosial memerlukan kritisisme yang lebih konsisten dan lumintu daripada ilmu-ilmu alam. Dan inilah persis yang diharapkan oleh Ibn Khaldun dalam penutup *magnum opus*-nya, *Muqaddimah*. [❖]